

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IWA LUKMANA
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 898987

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 3.085.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 356 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 681 m2/150 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp. 950.000.000
3. Tanah Seluas 3885 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
4. Tanah Seluas 4709 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah Seluas 2398 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 2924 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah Seluas 4830 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
8. Tanah Seluas 2114 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 66.000.000**

1. MOBIL, DATSUN GO+PANCA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 35.819.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	76.008.383
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.262.827.383
III. HUTANG	Rp.	364.704.438
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.898.122.945

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.